

**ANALISIS KELAIKLAUTAN KAPAL (*SEAWORTHINESS*) DAN KLAUSULA
JAMINAN (*WARRANTY*) DALAM HUBUNGAN HUKUM POLIS ASURANSI
KERANGKA KAPAL (*HULL AND MACHINERY INSURANCE*)**

INTISARI

Oleh

Supriadinata¹ Irna Nurhayati²

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis persyaratan *seaworthiness* dan klausula *warranty* dalam hubungan hukum Polis Asuransi Kerangka Kapal berdasarkan hukum asuransi laut dan hukum pelayaran yang berlaku, serta bagaimana praktiknya dalam putusan pengadilan apakah telah sesuai dengan hukum asuransi laut dan hukum pelayaran tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif yang memfokuskan pada penelitian studi dokumen, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum dan melakukan analisis kasus berdasarkan putusan pengadilan yang terjadi dalam praktik.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa jika terdapat pelanggaran *seaworthiness* dan klausula *warranty* dalam pelaksanaan Polis Asuransi Kerangka Kapal maka berdasarkan hukum asuransi laut dan hukum pelayaran, hal tersebut dapat memiliki konsekuensi hukum berupa pembebasan tanggung jawab penanggung atas pembayaran klaim asuransi kepada tertanggung. Dalam praktik putusan pengadilan terkait perkara gugatan wanprestasi antara PT. Asuransi Purna Arthanugraha dengan PT.Bina Usaha Maritim Indonesia, ketentuan pemenuhan persyaratan *seaworthiness* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran telah sesuai dengan apa yang diterapkan dalam putusan pengadilan. Sementara dalam praktik putusan pengadilan terkait dengan perkara gugatan wanprestasi antara PT. Baruna Shipping Line dan PT. Asuransi Jasa Indonesia – Persero, pengadilan belum melaksanakan dan menerapkan hukum pelayaran dan hukum asuransi laut yang berlaku dalam putusannya. Oleh karena itu, hendaknya pengadilan dapat mempertimbangkan aspek hukum pelayaran dan hukum asuransi laut yang berlaku dalam memeriksa dan mengadili sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan Polis Asuransi Kerangka Kapal.

Kata kunci : Polis Asuransi Kerangka Kapal, *Seaworthiness*, Klausula *Warranty*, Tanggung Jawab Penanggung.

¹ Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

ANALYSIS ON SEAWORTHINESS AND WARRANTY CLAUSE IN LEGAL RELATION OF HULL AND MACHINERY INSURANCE POLICY

ABSTRACT

By

Supriadinata¹ Irna Nurhayati²

The purpose of this research is to find out and analyze seaworthiness requirements and warranty clause in legal relation of Hull and Machinery Insurance Policy based on applicable marine insurance law and shipping law, and how courts' decisions are in practice whether they have been in accordance with such marine insurance law and shipping law.

Research method used is normative legal research which focuses on document study research, consisting of legislative regulations, legal literatures and conducting analysis on cases pursuant to courts' decisions in practice.

Based on research result, it is concluded that if a breach of seaworthiness and warranty clause exist in the implementation of Hull and Machinery Insurance Policy, then on the basis of marine insurance law and shipping law, it can have legal consequence which is exemption of the insurer's liability for an insurance claim payment to the insured. In court decision practice related to a breach of contract case between PT. Asuransi Purna Arthanugraha and PT. Bina Usaha Maritim Indonesia, provisions on fulfillment of seaworthiness requirements as governed under legislative regulations in the field of shipping has been in accordance with what has been applied in the court's decision. Meanwhile in court decision practice related to a breach of contract case between PT. Baruna Shipping Line and PT. Asuransi Jasa Indonesia – Persero, the court has not yet implemented and applied prevailing shipping law and marine insurance law in its decision. Therefore, the court should consider shipping law and marine insurance law aspects which prevail in examining and adjudicating the case in connection with the implementation of Hull and Machinery Insurance Policy.

Key words : Hull and Machinery Insurance Policy, Seaworthiness, Warranty Clause, Insurer Liability.

¹ Postgraduate Student Faculty of Law University of Gadjah Mada

² Lecturer Faculty of Law University of Gadjah Mada